

RINGKASAN

Yusrizal
NIM 237410101022

**PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SECARA
SPORADIK (Studi Penelitian Pada Kantor
Pertanahan Kota Lhokseumawe)**
(Prof. Dr. Yulia, S.H.,M.H. dan Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum.)

Penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik diwujudkan dalam bentuk pengumuman data fisik dan data yuridis dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dengan tujuan agar sanggahan dapat diajukan dalam masa pengumuman. Namun Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait sanggahan atau keberatan yang diajukan, baik sebelum pengumuman, dalam masa pengumuman maupun setelah pengumuman berakhir dan bahkan telah diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik, kendala dalam penerapannya serta upaya mengatasinya dan akibat hukum apabila tidak diterapkan Asas Publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan dengan wawancara dan literatur. Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Asas Publisitas dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe sudah merujuk pada ketentuan, namun pelaksanaannya masih ada yang kurang yaitu para Keuchik tidak melaksanakan pengumuman di objek tanahnya langsung dan ditempat keramaian lainnya yang mudah dilihat oleh Masyarakat. Kendalanya yaitu masih lemahnya pemahaman masyarakat dan Keuchik terhadap ketentuan pendaftaran tanah. Akibat hukum apabila Asas Publisitas tidak diterapkan dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik akan terbit sertipikat hak atas tanah yang tidak dapat memberikan kepastian hukum.

Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar memiliki *database* kontak person Keuchik dan menerapkan sistem tanda tangan elektronik pada pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik, kepada Keuchik agar melakukan pengumuman tepat di objek tanah yang dimohon hak supaya mudah diketahui publik dan kepada penyanggah agar dapat mencari informasi tentang alur proses serta ketentuan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Asas Publisitas, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

SUMMARY

Yusrizal
NIM 237410101022

APPLICATION OF PUBLICITY PRINSIPLES IN SPORADIC LAND REGISTRATION ACTIVITIES (Research Study at the Lhokseumawe City Land Office) (Prof. Dr. Yulia, S.H.,M.H. and Dr. Sulaiman, S.H.,M. Hum.)

The application of the Publicity Principle in land registration activities was first sporadically realized in the form of announcements of physical data and juridical data by referring to the provisions of Article 26 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration in conjunction with Article 88 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units and Land Registration, with the aim that objections can be submitted within the announcement period. However, the Lhokseumawe City Land Office has received a number of complaints from the public regarding objections or objections submitted, both before the announcement, during the announcement period and after the announcement ended and a certificate of land rights has even been issued.

This research aims to examine the application of the Publicity Principle in sporadic first-time land registration activities, the obstacles in its implementation as well as efforts to overcome them and the legal consequences if the Publicity Principle is not applied in sporadic first-time land registration activities at the Lhokseumawe City Land Office.

The research method used is empirical juridical research with a statutory regulation approach and a case approach. Data collection was carried out through field research techniques using interviews and literature. Data analysis in this research is qualitative analysis.

The results of the research show that the implementation of the Publicity Principle in land registration activities for the first time sporadically at the Lhokseumawe City Land Office has referred to the provisions, but there are still shortcomings in implementation, namely the Keuchik do not carry out announcements directly on the land object and in other crowded places that are easily seen by the public. The obstacle is that the community and Keuchik still have weak understanding of land registration provisions. The legal consequences if the Publicity Principle is not applied in land registration activities for the first time will sporadically result in land rights certificates being issued which cannot provide legal certainty.

It is recommended that the Lhokseumawe City Land Office have one *database* Keuchik's contact person and implementing an electronic signature system on sporadic land registration announcements, to the Keuchik to make the announcement right on the land object for which the rights are requested so that it is easily known to the public and to the objector so that they can seek information about the process flow and conditions for land registration at the Lhokseumawe City Land Office.

Keywords: Publicity Principle, Sporadic Land Registration